

**Analisis Program Kampung Iklim di Kota Depok Menurut Peratauran Direktur Jenderal  
Perubahan Iklim No.P1/PPI/SET/KUM.1/2/2017**

**Khanif Maulana Iman\*), Nunik Retno H\*\*), Dewi Erowati\*\*)**

**E-Mail: [khanifmaulanaimanb2@gmail.com](mailto:khanifmaulanaimanb2@gmail.com)**

**Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Diponegoro, Indonesia**

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269

Telepon (024)7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <https://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRAK**

Program Kampung Iklim Kota Depok bertujuan mengatasi dampak perubahan iklim akibat pemanasan global. Meskipun ada 8 RW di 5 Kelurahan yang berpartisipasi, hanya 2 RW di Kelurahan Ratujaya yang meraih gelar nasional Proklim Utama. Namun, ketidakmerataan dalam pelaksanaan program terlihat dibandingkan dengan Kelurahan lainnya.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kota Depok dan mengidentifikasi hambatan yang memengaruhi ketidakmerataan antar Kelurahan. Penelitian menggunakan teori Peraturan Direktur Jenderal Perubahan Iklim No P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 dan teori kebijakan publik Charles O. Jones. Metodenya adalah penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, serta analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kota Depok sudah cukup baik, meskipun masih perlu perbaikan di beberapa wilayah. Contohnya, di Kelurahan Sukamaju di dalam tahap persiapan, kelompok kerja Program Kampung Iklim perlu meningkatkan kinerjanya sesuai pedoman yang ada. Di Kelurahan Abadijaya dan Sukamaju, masih ada kendala dalam pelaksanaan karena kurangnya lahan untuk fasilitas penunjang kegiatan adaptasi dan mitigasi Program Kampung Iklim. Dalam analisis kebijakan publik Charles O. Jones, pelaksanaan Program Kampung Iklim sudah cukup baik, meskipun masih ada kekurangan dalam tahap keputusan, terutama terkait ketidakmerataan kegiatan adaptasi dan mitigasi di berbagai Kampung Iklim.

**Kata Kunci:** Analisis Pelaksanaan, Perubahan Iklim, Program Kampung Iklim, Indikator Persiapan, Indikator Pelaksanaan, Indikator *Decisions*

## **ABSTRACT**

*Program Kampung Iklim in Depok City aims to address the impact of climate change due to global warming. While 8 neighborhood units (RW) in 5 districts are participating, only 2 RWs in Ratujoya Village have achieved the national Proklamasi Utama award. However, disparities in program implementation are evident when compared to other villages.*

*This research aims to analyze the implementation of the Program Kampung Iklim in Depok City and identify barriers affecting disparities among villages. The study utilizes the theory of Directorate General of Climate Change Regulation No. P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 and Charles O. Jones' public policy theory. The research employs a qualitative method with data collection through interviews and documentation, followed by data reduction, presentation, and drawing conclusions.*

*The research findings indicate that the implementation of the Program Kampung Iklim in Depok City is relatively good, although improvements are needed in some areas. For instance, in Sukamaju Village during the preparation phase, the Program Kampung Iklim working groups need to enhance their performance in line with the guidelines. In Abadijaya and Sukamaju Villages, there are still challenges in implementation due to the lack of land for facilities supporting adaptation and mitigation activities of the Program Kampung Iklim. In the analysis using Charles O. Jones' public policy theory, the implementation of the Program Kampung Iklim is fairly good, but there are still deficiencies in the decision-making stage, particularly concerning the uneven distribution of adaptation and mitigation activities across various Climate Villages*

**Keywords:** *Implementations Analysis, Climate Change, Program Kampung Iklim, Preparations Indicators, Implementations Indicators, Decisions Indicators*

\*) Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

\*) Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

### **A. PENDAHULUAN**

Peningkatan konsentrasi Gas Rumah Kaca akibat aktivitas manusia memiliki dampak serius pada kenaikan suhu permukaan bumi, yang merupakan pemicu utama dari fenomena Global Warming atau pemanasan global. Akibat dari pemanasan global, terjadi perubahan iklim yang berdampak merugikan bagi kehidupan manusia. Perubahan iklim mencakup berbagai aspek seperti perubahan pola cuaca, pergeseran parameter iklim seperti suhu, angin, kelembaban, tutupan awan,

penguapan, dan curah hujan. Semua ini didorong oleh pemanasan global yang menyebabkan cuaca ekstrem dan perubahan kondisi iklim yang signifikan jika dibandingkan dengan kondisi iklim normal.

Perubahan iklim bukan lagi masalah biasa, melainkan menjadi salah satu ancaman terbesar bagi kehidupan manusia dan ekosistem di seluruh dunia. Indonesia, sebagai salah satu negara penghasil Gas Rumah Kaca terbesar di dunia, berkontribusi besar terhadap masalah ini. Emisi Gas Rumah Kaca dihasilkan dari berbagai sektor,

seperti penggunaan lahan, energi, pertanian, industri, dan sampah. Penelitian dari World Resource Institute mengonfirmasi kontribusi besar Indonesia dalam emisi ini.

Data dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menunjukkan peningkatan suhu di Asia Tenggara pada abad ini sekitar 0,4-1 derajat Celsius, dan perkiraan menunjukkan peningkatan hingga 1,5-2 derajat Celsius dalam 30 tahun mendatang. Selain itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat bahwa suhu rata-rata di Indonesia meningkat hingga 1,2 derajat Celsius sejak tahun 2016, melebihi rata-rata global yang sekitar 1 derajat Celsius.

Dengan latar belakang ini, upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim menjadi prioritas utama dalam rangka menghindari dampak yang lebih parah dari perubahan iklim ini. Adaptasi perubahan iklim adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan kita dalam menghadapi dampak perubahan iklim, sementara mitigasi perubahan iklim mencakup langkah-langkah untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca.

Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi payung hukum yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengendalikan dampak perubahan iklim. Undang-Undang ini juga memberikan peran kepada masyarakat untuk

berpartisipasi aktif dalam melindungi lingkungan hidup di sekitarnya. Partisipasi masyarakat dapat berupa peningkatan kesadaran tentang pengelolaan lingkungan, pengembangan kemampuan, pengawasan sosial, dan pelestarian budaya dan kearifan lokal.

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengatasi perubahan iklim, dan salah satu inisiatifnya adalah Program Kampung Iklim. Program ini merupakan strategi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengendalikan perubahan iklim dengan mendorong kerja sama antara berbagai pihak guna memperkuat kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis komunitas. Melalui Program Kampung Iklim, masyarakat diajak untuk aktif berpartisipasi dalam upaya mengatasi perubahan iklim, mulai dari tingkat rumah tangga hingga tingkat komunitas.

Untuk mendukung pelaksanaan Program Kampung Iklim, pemerintah telah mengeluarkan peraturan, seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2016. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya dan memberikan pedoman pelaksanaan Program Kampung Iklim. Di tingkat provinsi, ada peraturan yang mengatur Program Kampung Iklim, seperti Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56

Tahun 2012 tentang RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Barat.

Kota Depok, sebagai salah satu kota di Jawa Barat, merasakan dampak perubahan iklim, seperti banjir, kekeringan, dan perubahan suhu. Pemerintah Kota Depok telah aktif berpartisipasi dalam Program Kampung Iklim dan berupaya untuk melibatkan masyarakat dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Beberapa RW di Kota Depok telah bergabung dalam Program Kampung Iklim.

Namun, pelaksanaan Program Kampung Iklim di berbagai wilayah Kota Depok belum merata dalam tingkat keberhasilannya. Beberapa RW mungkin lebih sukses dibandingkan yang lain dalam melaksanakan program ini. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kota Depok sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017.

Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kota Depok, kita dapat mengidentifikasi kendala-kendala yang mungkin dihadapi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki dan menyempurnakan program ini guna mencapai tujuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara lebih efektif.

## **B. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kota Depok sesuai dengan peraturan pedoman pelaksanaan Program Kampung Iklim yaitu Peraturan Direktur Jenderal Perubahan Iklim No P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017.

## **C. KERANGKA TEORI**

Dalam penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan Program Kampung Iklim sesuai dengan pedoman peraturan pelaksanaan Program Kampung Iklim, peneliti menggunakan dua model teori, yaitu Program Kampung Iklim yaitu Peraturan Direktur Jenderal Perubahan Iklim No P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 yang mempunyai 4 Indikator, yaitu :

### **1. Persiapan**

Didalam tahap ini terdapat dua perintah, yaitu pembentukan kelompok kerja dan pembuatan kerentanan dan emisi gas rumah kaca

### **2. Perencanaan**

Indikator perencanaan terdapat dua tahapan, yaitu perencanaan pengembangan, peningkatan kapasitas, dan kelembagaan masyarakat dan tahapan penyusunan rencana aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tingkat lokal berbasis masyarakat.

3. Pelaksanaan  
Indikator pelaksanaan terdapat dua tahapan, yaitu tahapan pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tingkat lokal berbasis masyarakat dan tahapan peningkatan kapasitas akses sumberdaya, pendanaan, serta teknologi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
4. Pengembangan dan penguatan Program Kampung Iklim  
Indikator ini terdapat kegiatan pemantauan dan evaluasi yang bertujuan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan Program Kampung Iklim.

Selain menggunakan teori Program Kampung Iklim yaitu Peraturan Direktur Jenderal Perubahan Iklim No P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017, peneliti juga menambahkan teori Kebijakan Publik dari Charles O Jones, dimana terdapat 5 indikator, yaitu :

1. Goal, elemen ini membicarakan tentang tujuan yang ingin dicapai,
2. Proposal, hal ini membicarakan tentang hal hal yang lebih spesifik guna mencapai tujuan,
3. Programs, hal ini membicarakan tentang upaya upaya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai,
4. Decision, hal ini membicarakan upaya upaya untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.

5. Effect, hal ini membicarakan tentang sebuah akibat dari adanya program

#### **D. METODE**

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Subject penelitian ini yakni Program Kampung Iklim di Kota Depok (Kelurahan Ratujoya, Rangkapanjaya, Baktijaya, Abadijaya, dan Sukamaju), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok, ketua kelompok kerja Program Kampung Iklim dan juga masyarakat.

#### **E. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam menganalisis pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kota Depok menggunakan 2 teori, yaitu teori Peraturan Direktur Jenderal Perubahan Iklim No P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 and teori kebijakan publik dari Charles O Jones, dimulai dari Peraturan Direktur Jenderal Perubahan Iklim No P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 yang mempunyai 4 Indikator yaitu:

1. Persiapan

Dalam tahapan ini Program Kampung Iklim di Kota Depok yang terdapat di Kelurahan Ratujoya, Rangkapanjaya, Baktijaya, Abadijaya dan Sukamaju sudah terdapat kelompok kerja Program Kampung Iklim. Lalu didalam tahap

perencanaan kelompok kerja diminta untuk berperan aktif untuk menjalin komunikasi dengan berbagai pihak dalam hal ini terdapat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok dan juga berperan aktif menjalin komunikasi dengan pihak swasta yang dilakukan beberapa daerah seperti Kelurahan Ratujaya dan Kelurahan Baktijaya.

Di dalam tahapan persiapan juga kelompok kerja diminta untuk membangun kesepahaman antar anggota kelompok kerja, dalam hal ini kelompok kerja di Kelurahan Ratujaya, Kelurahan Rangkapanjaya, Kelurahan Baktijaya dan Kelurahan Abadijaya sudah melakukan penyamarataan visi dan misi antar anggota kelompok kerja Program Kampung Iklim. Untuk Kelurahan Sukamaju masih dalam proses penyamarataan visi dan misi antar anggota kelompok kerja Program Kampung Iklim, hal ini dikarenakan Program Kampung Iklim di Kelurahan Sukamaju baru berjalan kurang dari satu tahun.

Di dalam tahapan persiapan kelompok kerja diminta untuk selalu memotivasi masyarakat, hal ini sudah dilakukan oleh kelompok kerja Program Kampung Iklim di setiap Kelurahan. Memotivasi masyarakat bertujuan agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan pelaksanaan Program Kampung

Iklim yang dilaksanakan di Kelurahan masing-masing.

Dapat disimpulkan bahwa dalam tahapan persiapan sudah berjalan cukup baik, walaupun masih terdapat permasalahan di bagian membangun kesepahaman antara anggota kelompok di Kelurahan Sukamaju.

## 2. Tahap Perencanaan

Dalam tahap perencanaan pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kota Depok kelompok kerja Program Kampung Iklim diminta untuk melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan, dalam hal ini kelompok kerja di setiap kelurahan sudah melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan dengan tujuan agar pelatihan pelatihan yang nantinya diberikan kepada masyarakat sesuai dengan kondisi wilayah, kondisi sosial ekonomi di masing-masing Kelurahan Program Kampung Iklim.

Setelah melakukan kegiatan identifikasi kebutuhan pelatihan, kelompok kerja Program Kampung Iklim melakukan perencanaan peningkatan kemampuan masyarakat, hal ini dilakukan dengan cara kelompok kerja Program Kampung Iklim di Kelurahan yang diteliti melakukan kegiatan seminar, sosialisasi, pelatihan kepada masyarakat sesuai dengan kondisi wilayahnya masing-masing.

Selanjutnya setelah melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan dan perencanaan peningkatan kemampuan masyarakat, kelompok kerja melakukan kegiatan penyusunan rencana aksi adaptasi dan mitigasi pengendalian perubahan iklim. Hal ini sudah dilakukan yang mana hasil dari penyusunan rencana aksi adaptasi dan mitigasi akan dilaksanakan di tahap pelaksanaan.

Dapat disimpulkan bahwa didalam tahap perencanaan sudah dilakukan dengan baik, dimana kelompok kerja Program Kampung Iklim di Kelurahan Ratujuaya, Rangkapanjaya, Baktijaya, Abadijaya dan Sukamaju telah melakukan setiap arahan yang terdapat di dalam tahap persiapan yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Perubahan Iklim No P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017

### 3. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan adalah tahap dimana wilayah Kampung Iklim melaksanakan kegiatan adaptasi dan mitigasi, kegiatan adaptasi dan mitigasi terdapat 6 kategori kegiatan, yaitu pengendalian kekeringan, banjir dan longsor, Peningkatan ketahanan pangan, Penanganan atau antisipasi kenaikan air muka laut, Pengendalian sampah, limbah padat dan cair, Menggunakan energi baru terbarukan konservasi dan

penghematan energi dan pengendalian penyakit terkait iklim.

Di kegiatan Pengendalian kekeringan, banjir dan longsor terdapat perbedaan jumlah kegiatan di masing-masing Kelurahan, di Kelurahan Ratujuaya, Rangkapanjaya dan Baktijaya melakukan banyak kegiatan di kategori ini, namun di Kelurahan Abadijaya dan Sukamaju memiliki jumlah kegiatan yang relatif sedikit jika dibandingkan dengan Kelurahan lainnya, hal ini dikarenakan tidak adanya lahan kosong untuk membangun sarana dan prasarana kegiatan adaptasi dan mitigasi dalam Program Kampung Iklim.

Di kegiatan peningkatan ketahanan pangan, di setiap Kelurahan memiliki jumlah kegiatan yang relatif sama yaitu melakukan kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan, dan pertanian terpadu.

Di kegiatan penanganan atau antisipasi kenaikan air laut, di setiap Kelurahan tidak melakukan kegiatan tersebut, hal ini dikarenakan Kota Depok jauh dari pesisir pantai.

Di Kegiatan Pengelolaan sampah, limbah padat dan cair terdapat perbedaan jumlah kegiatan, Kelurahan Ratujuaya, Rangkapanjaya dan Baktiaya memiliki jumlah kegiatan yang banyak, hal ini dikarenakan di Kelurahan tersebut terdapat sarana dan prasarana penunjang kegiatan, seperti adanya bank sampah,

PBB sampah, Kantin sampah dan lain-lain. Berbanding terbalik dengan Kelurahan Sukamaju dan Abadijaya yang hanya terdapat kegiatan pilah-pilah sampah, hal ini dikarenakan tidak adanya fasilitas penunjang seperti di Kelurahan lainnya.

Di Kegiatan Menggunakan Energi terbarukan, konservasi dan penghematan energi pun juga demikian, dimana di Kelurahan Ratujaya, Rangkapanjaya, dan Baktijaya memiliki lebih banyak kegiatan yang dilakukan, sedangkan di Kelurahan Abadijaya dan Sukamaju hanya terdapat kegiatan yaitu melakukan sosialisasi penggunaan lampu LED kepada masyarakat, hal ini dikarenakan tidak adanya fasilitas penunjang dalam pelaksanaannya kegiatan ini.

Di kegiatan pengendalian penyakit terkait iklim, di setiap Kelurahan memiliki kegiatan yang sama, seperti melakukan fogging, jumentik, dan sanitasi air bersih.

Dapat disimpulkan bahwa dalam tahap pelaksanaan Program Kampung Iklim sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perubahan Iklim No P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 masih terdapat perbedaan jumlah kegiatan di masing-masing kelurahan, hal ini dikarenakan tidak adanya fasilitas

penunjang kegiatan adaptasi dan mitigasi pengendalian perubahan iklim.

#### 4. Tahap Pengembangan dan Penguatan Kampung Iklim

Pengembangan dan penguatan Program Kampung Iklim dilaksanakan dengan melakukan kegiatan evaluasi yaitu dengan cara DLHK Kota Depok melakukan kunjungan langsung ke Kampung Iklim untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Kampung Iklim. Dimana DLHK sudah melakukan kunjungan untuk kegiatan Monev ke Kampung Iklim di Kelurahan Ratujaya, Rangkapanjaya, Baktijaya, Abadijaya dan Sukamaju.

Setelah melakukan analisis menggunakan Peraturan Direktur Jenderal Perubahan Iklim No P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017, maka bisa dilihat dan di elaborasi dengan teori kebijakan publik dari Charles O Jones, yaitu:

##### 1. *Goals*

Tujuan dari adanya Program Kampung Iklim adalah untuk meningkatkan pemahaman mengenai perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkan, dan mendorong pelaksanaan aksi nyata yang dapat memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim serta memberikan kontribusi terhadap



upaya pengurangan emisi GRK. Program Kampung Iklim juga memiliki beberapa tujuan khusus, yaitu :

- a) Mendorong kelompok masyarakat melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim ditingkat lokal
- b) Memberikan pengakuan terhadap aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal yang telah dilakukan oleh kelompok masyarakat
- c) Memberikan pengakuan terhadap pemerintah daerah dalam penguatan pelaksanaan PROKLIM.
- d) Memberikan pengakuan terhadap pendukung dalam rangka fasilitasi pembentukan dan pengembangan PROKLIM.
- e) Mendorong penyebaran kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah berhasil dilaksanakan pada lokasi tertentu untuk dapat diterapkan di daerah lain sesuai dengan kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat setempat.

## 2. *Proposals*

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu membuat masyarakat dapat menyesuaikan diri terhadap dampak yang terjadi, Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim, dengan adanya peraturan tersebut, terbitlah Peraturan Dirjen Perubahan Pengendalian Iklim No P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim. Untuk di Kota Depok sendiri menurut Ketua Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok, pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kota Depok berpedoman pada Peraturan Peraturan Dirjen Perubahan Pengendalian Iklim No P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim.

## 3. *Programs*

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu membuat masyarakat dapat menyesuaikan diri terhadap dampak dari perubahan iklim di Kota Depok, Kota Depok melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok melaksanakan kegiatan Program Kampung Iklim. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok terus mendorong dan melakukan upaya agar Program Kampung Iklim yang diinisiasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dapat terbentuk

secara merata, salah satunya dengan membentuk kampaing iklim disetiap wilayah. Selama 12 tahun keberjalananya, Kota Depok berhasil meraih sertifikat Proklamasi.

#### 4. *Decisions*

Decisions atau keputusan- keputusan spesifikasi tindakan-tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan, mengembangkan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program. Di tahap decisions ini, Program Kampung Iklim sudah mempunyai pilihan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan kampung iklim, pilihan kegiatan adaptasi dan mitigasi telah dicantumkan didalam Peraturan Peraturan Dirjen Perubahan Pengendalian Iklim No P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 tahap pelaksanaan. Terdapat kegiatan adaptasi dan mitigasi yaitu:

- a) Pengendalian kekeringan, banjir dan longsor
- b) Peningkatan ketahanan pangan, penanganan atau antisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, abrasi atau erosi akibat angin, gelombang tinggi
- c) Pengendalian penyakit terkait iklim
- d) Pengelolaan sampah, limbah padat dan cair
- e) Menggunakan Energi Baru Terbarukan Konservasi dan Penghematan Energi

Namun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan jumlah kegiatan di beberapa wilayah Program Kampung Iklim, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Kelurahan Sukamaju dan Abadijaya memiliki kegiatan adaptasi dan mitigasi lebih sedikit jika dibandingkan dengan Kelurahan lainnya, hal ini dikarenakan wilayah tersebut adalah wilayah padat penduduk yang menyebabkan tidak adanya lahan kosong untuk membangun fasilitas penunjang kegiatan adaptasi dan mitigasi Program Kampung Iklim.

Dalam tahap decision terdapat kegiatan untuk melaksanakan evaluasi and monitoring, hal ini sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok dengan melakukan kunjungan ke wilayah kampung iklim di Kota Depok untuk melakukan kegiatan Monitoring dan evaluasi.

#### 5. *Effect*

Dampak dari adanya Program Kampung Iklim yang diselenggarakan di Kota Depok masyarakat akan menerima manfaat, seperti meningkatkan ketahanan dalam menghadapi variasi iklim dan dampak perubahan iklim, lalu juga dapat meningkatkan kualitas hidup and sosial ekonomi masyarakat. Keterampilan masyarakat juga

meningkat sehingga dapat mengurangi pengeluaran sehari-hari dan menambah ekonomi keluarga. Hal ini dibuktikan di beberapa Kelurahan yang menerapkan Kampung Iklim, sebagai contoh Kelurahan Ratujuaya yang membuat kantin sampah, kantin sampah ini adalah tempat transaksi jual beli dengan metode pembayaran berupa sampah, selain itu di Kelurahan Ratujuaya memanfaatkan pertanian buah markisa untuk dijual kembali jika sudah musim panen, lalu masyarakat yang telah diajarkan bagaimana memanfaatkan lahan kosong untuk dijadikan tanaman hidroponik bisa mengambil manfaatnya jika sayur sayuran yang ditanam telah panen, entah sayuran itu dikonsumsi kembali atau dijual belikan.

Dampak dari adanya Program Kampung Iklim yang diselenggarakan di Kota Depok masyarakat akan menerima manfaat, seperti meningkatkan ketahanan dalam menghadapi variasi iklim dan dampak perubahan iklim, lalu juga dapat meningkatkan kualitas hidup and sosial ekonomi masyarakat. Keterampilan masyarakat juga meningkat sehingga dapat mengurangi pengeluaran sehari-hari dan menambah ekonomi keluarga. Hal ini dibuktikan di beberapa Kelurahan yang menerapkan Kampung Iklim, sebagai contoh Kelurahan Ratujuaya yang membuat

kantin sampah, kantin sampah ini adalah tempat transaksi jual beli dengan metode pembayaran berupa sampah, selain itu di Kelurahan Ratujuaya memanfaatkan pertanian buah markisa untuk dijual kembali jika sudah musim panen, lalu masyarakat yang telah diajarkan bagaimana memanfaatkan lahan kosong untuk dijadikan tanaman hidroponik bisa mengambil manfaatnya jika sayur sayuran yang ditanam telah panen, entah sayuran itu dikonsumsi kembali atau dijual belikan.

## **F. KESIMPULAN**

Penelitian mengenai pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kota Depok dengan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perubahan Pengendalian Iklim No P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 menyimpulkan bahwa program ini secara keseluruhan telah mengikuti pedoman yang ditetapkan. Namun, temuan dalam penelitian ini mengungkap beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

Pertama, dalam tahap persiapan di Kecamatan Sukamaju, kader Program Kampung Iklim belum sepenuhnya melaksanakan program ini secara maksimal. Ini mengindikasikan perlunya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan kader di wilayah tersebut.

Kedua, dalam tahap pelaksanaan, terdapat kendala signifikan di wilayah

Kecamatan Sukamaju dan Abadijaya. Kendala utamanya adalah tidak tersedianya lahan kosong yang dapat digunakan untuk membangun sarana dan prasarana yang mendukung Program Kampung Iklim. Ini menunjukkan perlunya pemikiran kreatif untuk mengatasi keterbatasan lahan dalam pelaksanaan program.

Ketiga, penelitian juga mencatat bahwa indikator keputusan (Decision) dalam pelaksanaan program belum diimplementasikan secara merata, yang bertentangan dengan teori kebijakan publik yang menggarisbawahi pentingnya pengukuran yang konsisten.

Selain itu, ada beberapa faktor penghambat yang perlu dicermati dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kota Depok. Salah satunya adalah keterbatasan dana operasional, dengan mayoritas wilayah yang menghadapi kendala terkait kekurangan bantuan tunai dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) atau instansi pemerintah lainnya. Kendala lainnya adalah kurangnya lahan kosong yang dapat digunakan untuk membangun sarana dan prasarana pendukung program ini.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas Program Kampung Iklim di Kota Depok, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengatasi kendala ini, termasuk perbaikan dalam koordinasi, alokasi dana, serta upaya untuk menemukan solusi alternatif terkait lahan kosong. Selain itu, perlunya

implementasi indikator keputusan yang lebih merata juga harus menjadi fokus dalam perbaikan pelaksanaan program ini.

## **G. SARAN**

Untuk mengatasi permasalahan yang telah diidentifikasi dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kota Depok, berikut beberapa saran:

1. **Peningkatan Pelibatan Kader:** Diperlukan pendekatan yang lebih aktif dalam melibatkan kader Program Kampung Iklim di Kecamatan Sukamaju. Ini bisa mencakup pelatihan tambahan, seminar, atau lokakarya untuk memperkuat pemahaman mereka tentang program ini dan memotivasi keterlibatan yang lebih aktif.
2. **Mencari Solusi Alternatif Lahan:** Mengingat keterbatasan lahan kosong, perlu dilakukan penelusuran solusi alternatif. Salah satunya adalah dengan berkolaborasi dengan pihak swasta atau pemilik lahan untuk menyediakan area yang dapat digunakan untuk keperluan Program Kampung Iklim.
3. **Alokasi Dana yang Lebih Baik:** Pemerintah setempat harus mempertimbangkan alokasi dana yang lebih memadai untuk mendukung pelaksanaan Program Kampung Iklim di berbagai wilayah. Ini dapat termasuk pengadaan dana operasional tambahan

dan fasilitasi akses ke sumber daya keuangan lainnya.

4. Peningkatan Koordinasi: Peningkatan koordinasi antara berbagai pihak terkait, termasuk instansi pemerintah, masyarakat lokal, dan pihak swasta, akan membantu mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Koordinasi yang baik dapat membantu dalam mencari solusi bersama untuk permasalahan seperti ketersediaan lahan.
5. Implementasi Indikator Keputusan yang Konsisten Untuk memastikan keseragaman dalam pengukuran keberhasilan program, penting untuk memastikan bahwa indikator keputusan (Decision) diimplementasikan secara merata di semua wilayah pelaksanaan Program Kampung Iklim.
6. Edukasi dan Komunikasi: Upaya edukasi dan komunikasi kepada masyarakat setempat tentang manfaat dan tujuan Program Kampung Iklim perlu ditingkatkan. Ini dapat membantu meningkatkan dukungan dan pemahaman masyarakat terhadap program ini, serta meningkatkan partisipasi mereka.
7. Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan: Program perlu dievaluasi secara berkala, dan hasil evaluasi harus digunakan untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Ini akan memastikan bahwa program terus berkembang dan

menjadi lebih efektif seiring berjalannya waktu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aldrian, E., & Budiman, M. K. (2011). *Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia*. (Pusat Perubahan Iklim dan Kualitas Udara, Kedeputian Bidang Klimatologi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)
- Anderson, J, (1978). *Public Policy-Making, Second edition*, Holt, Rinehart and Winston: 1979 dalam Islamy, Irfan, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Cetakan 12, Bumi Aksara, Jakarta:2003.
- Anderson, James, A. 1997. *Public Policy Making Third Edition*, USA, Penerbit Houghton Mifflin Company.
- Arifin Tahir, 2014, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung : Alvabeta.
- BAPPENAS (2015). *Baseline Development & GHG Emission Abatement Policy Scenario for RAN GRK and INDC Review* (Jakarta: Bappenas)
- Berita.Depok.go.id (2022, March 26). *Ancaman Nyata Perubahan Iklim, Ini Pesan Wakil Wali Kota Depok*. Portal

- Berita Resmi Pemerintah Kota Depok. Retrieved October 6, 2022, from <https://berita.Depok.go.id/ancaman-nyata-perubahan-iklim-ini-pesan-wakil-wali-Kota-Depok>.
- Budi Winarno, 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses, (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: Media Pressindo, ISBN -979-222-207-3.
- Cresswell, J. W. (2018). *30 Keterampilan Esensial untuk Peneliti Kualitatif*. (E.metpSetiyawati, Penerj.) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewi, A, Maryono, & Warsito, B. (2019) *IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG IKLIM DI KOTA SURAKARTA. Proceeding Biology Educaion Conference* 16(1), 221-228.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kota(2018). *Musim Penghujan, Dandim 0508/Depok Minta Warga Waspadaai potensi bencana. Portal Berita Resmi Pemerintah Kota Depok. Retrieved February 6, 2023, from <https://berita.Depok.go.id/musim-penghujan-dandim-0508Depok-minta-warga-waspadaai-potensi-bencana>*.
- Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim (2017, Desember). *Road Map ProKlim*.
- DLH Jawa Barat (2018, 26 April). *Rapat Koordinasi ProKlim 2018*.
- DLH Provinsi Jawa Barat (2022, 11 April). *Sosialisasi Program Kampung Iklim Jawa Barat*.
- Faedlulloh, D., Irawan, B., & Prasetyanti, R. (2019). *Program unggulan kampung iklim (proklim) berbasis pemberdayaan masyarakat*. Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 4(1), 28–44. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v4i1.2364>.
- Fitria, S.,Wazni. (2020). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KAMPUNG IKLIM (PROKLIM) DI KELURAHAN TOBEK GONDANG KECAMATAN BINAWIDYA KOTA PEKANBARU TAHUN 2020*. Publisia: Jurnal Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Riau.
- Friedrich Carl J. 1963. *Man and His Government*. Newyork: Mc Graw-Hill.
- Gortner, Harold F. 1984. *Adinistration in The Public Sector*. New York, Jhon Willy.
- Hamdi, Muchlis (2014) *Kebijakan Public: Proses, Analisis Dan Partisipasi*. Bogor : Ghalia Indonesia, Hlm 17.

- Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi, (Makasar: Sekolah Tinggi Theologi, 2018).
- IPCC, 2013: *Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 1535 pp.
- Iskandar, J. (2012). *Kapita Selekta teori Administrasi Negara*. Bandung: Puspaga.
- Mardalis, Metode Penelitian, Jakarta, Bumi Aksara, 2009, Hlm. 55-56.
- Martono, Nanang. 2010. "Metode Penelitian Kuantitatif (Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder)". Jakarta: Raja Grafindo. Hlm. 9.
- Moleong, Lexy. J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muadi, S., Ismail MH., A. Sofwani. 2016. *Konsep dan kajian teori perumusan kebijakan publik*. J. Review Politik. Vol 6.
- Muharmansyah, D. (2019, 05 01). [cnnIndonesia.com](https://m.cnnIndonesia.com/teknologi/20190430184359-199-390935/suhu-bumi-naik-1-derajat-bencana-di-Indonesia-semakinmarak). Diambil kembali dari CNNIndonesia: <https://m.cnnIndonesia.com/teknologi/20190430184359-199-390935/suhu-bumi-naik-1-derajat-bencana-di-Indonesia-semakinmarak>.
- Mulya, P. (2019, November 4). *DLHK Kota Depok gelorakan Program Kampung Iklim*. RADAR DEPOK. Retrieved October 20, 2022, from <https://www.radarDepok.com/2019/11/dlhc-Kota-Depok-gelorakan-program-kampung-iklim/>.
- Naihasya, Syahrir. 2006. *Kebijakan Publik Menggapai Masyarakat Madani*. Yogyakarta: Mida Pustaka.
- Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), hal. 76-77.
- Nugroho, 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, D, Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis, Jakarta*, Bumi Aksara, 2006, Hlm. 57.

- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). *Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. Jurnal publik*, 11(1), 1-12.
- Rinaldy, R., Nulhaqim, S. A., & Gutama, A. S. (2017). *Proses Community Development Pada Program Kampung Iklim Di Desa Cupang Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon (Studi Kasus Program Bank Sampah Dalam Program Kampung Iklim). Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2).  
<https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14344>.
- Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Hal 20-22.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT. Alfabet, Hal 20-22.
- Sulaiman, Munandar. (1998). *Dinamika Masyarakat Transisi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hal 5-7.
- Tahir, A. (2018). *Kebijakan Publik dan Good Governance*.
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wiratna SujaRWeni, *Statistik Untuk Bisnis Dan Ekonomi*, Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2015, Hlm. 84.
- Yin, R. (2002). *Case study research: Design and methods (2rd, ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage.